



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

DIPLOMASI MARITIM DENMARK INDONESIA DALAM MENCAPAI
POROS MARITIM DUNIA

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Ratu Klara Ratnasari

2014330212

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

DIPLOMASI MARITIM DENMARK INDONESIA DALAM
MENCAPAI POROS MARITIM DUNIA

Skripsi

Oleh

Ratu Klara Ratnasari

2014330212

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ratu Klara Ratnasari
Nomor Pokok : 2014330212
Judul : Diplomasi Maritim Denmark Indonesia dalam Mencapai Poros
Maritim Dunia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 23 Juni 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., MSi. :

Sekretaris

Y. Purwadi Hermawan, Drs., MA., Ph.D :

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratu Klara Ratnasari
NPM : 2014330212
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Diplomasi Maritim Denmark Indonesia Dalam Mencapai Poros
Maritim Dunia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Juni 2018



Ratu Klara Ratnasari

ABSTRAK

Nama : Ratu Klara Ratnasari
NPM : 2014330212
Judul : Diplomasi Maritim Denmark Indonesia Dalam Mencapai Poros Maritim Dunia

Poros Maritim Dunia merupakan perwujudan dari visi kelautan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur bersesuaian dengan kepentingan nasionalnya. Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, Indonesia menggunakan mekanisme Diplomasi Maritim dengan bekerjasama bersama Denmark sebagai negara yang memiliki visi serupa yaitu menjadi pemimpin maritim dunia. Sehingga penelitian ini berangkat dengan pertanyaan penelitian, “Apa kontribusi Diplomasi Maritim antara Denmark dan Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagai Poros Maritim Dunia?”.

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi kerjasama dengan Denmark mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam mencapai visi Poros Maritim Dunia. Terdapat dua bentuk kerjasama Denmark dan Indonesia menurut Diplomasi Maritim Kooperatif yaitu *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* dan *Goodwill Visit*. Bidang kerjasama yang dilakukan dalam sektor maritim dengan Denmark mencakup empat hal yaitu Pembangunan Pelayaran Dan Pelabuhan Teknologi dan Servis Maritim, Pengelolaan Sampah Laut, Pengakuan Pelaut, dan Riset Kemaritiman atau Transfer Pengetahuan. Semua bidang kerjasama berkesesuaian dengan misi Kebijakan Kelautan Indonesia yang mengakomodasi Indonesia mencapai visinya sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan demikian, Denmark berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pembangunan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, penegakan kedaulatan hukum dan keselamatan di laut, perlindungan lingkungan laut, dan tentunya pelaksanaan diplomasi maritim. Semua kontribusi tersebut membantu Indonesia dalam mencapai tujuan politik luar negerinya sebagai Poros Maritim Dunia.

Kata kunci: Diplomasi Maritim, Indonesia, Denmark, dan Poros Maritim Dunia.

ABSTRACT

Nama : Ratu Klara Ratnasari
NPM : 2014330212
Judul : *Maritime Diplomacy between Denmark and Indonesia Towards Global Maritime Fulcrum*

Global Maritime Fulcrum is a manifestation of the marine vision in the era of President Joko Widodo's leadership in order to raise Indonesia as a great, strong, and prosperous maritime country portrayal in accordance with its national interests. In realizing Global Maritime Fulcrum, Indonesia uses Maritime Diplomacy in collaboration with Denmark as a country that has a similar vision of becoming a world maritime leader. This research departs with the research question, "What is the contribution of Maritime Diplomacy between Denmark and Indonesia in achieving its objectives as a Global Maritime Fulcrum?"

Research found that the contribution of cooperation with Denmark accommodated the interests of Indonesia in achieving the vision of being Global Maritime Fulcrum. There are two forms of cooperation between Denmark and Indonesia according to Cooperative Maritime Diplomacy that is Humanitarian Assistance Disaster Relief (HADR) and Goodwill Visit. The field of cooperation undertaken in the maritime sector with Denmark includes four things: Sea Transportation and Maritime Service Development and Services, Waste Management, Seafarers Recognition, and Maritime Research or Knowledge Transfer. All areas of cooperation are in line with the mission of the Indonesian Ocean Policy that accommodates Indonesia to achieve its vision as Global Maritime Fulcrum. Therefore, Denmark contributes to resource management, marine knowledge and technology development, law and safety sovereignty enforcement, marine environment, and the implementation of maritime diplomacy. This support helps Indonesia in achieving its foreign policy as the Global Maritime Fulcrum.

Keywords: Maritime Diplomacy, Indonesia, Denmark, Global Maritime Fulcrum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan pertolongan-Nya peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Diplomasi Maritim Denmark Indonesia Dalam Mencapai Poros Maritim Dunia”. Ketertarikan peneliti dalam menunjukkan bahwa Diplomasi Maritim dapat menjadi mekanisme penting dalam mencapai tujuan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga diteliti sebagai suatu skripsi di bidang ilmu hubungan internasional dan merupakan isu yang menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Adapun tujuan pengambilan topik diaspora adalah agar pembaca mendapatkan informasi dan wawasan mengenai hubungan Indonesia dan Denmark dalam pengembangan bidang maritim di bawah kepemimpinan Joko Widodo bagi pembaca penelitian terutama para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian terkait isu Diplomasi Maritim.

Dengan terselesaikan skripsi ini, Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk memperkaya bidang keilmuan khususnya ilmu hubungan internasional, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para akademisi dalam mengembangkan ilmu dalam bidang hubungan internasional

Bandung, 3 Agustus 2018

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas hikmat, akal budi serta pertolongan-Nya skripsi ini mampu diselesaikan
2. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar Situmorang, Ph.d, beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, beserta jajarannya, serta ketua program studi Ilmu Hubungan Internasional Sylvia Yazid, Ph.d
3. Dosen pembimbing, Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs., MA., Ph.D yang telah membimbing peneliti dengan sangat baik dan tegas selama proses pembuatan skripsi dimana setiap bimbingan saya selalu mendapat arahan serta ide untuk menyempurnakan penelitian ini. Terimakasih banyak, Mas Pur.
4. Penguji, Bapak Dr. I Nyoman Sudira, Drs., MSi. dan Idil Syawfi, S.IP., M.Si.. yang telah memberikan saya nilai yang memuaskan dan meluluskan saya dalam sidang skripsi.
5. Keluarga kecil kesayanganku, terimakasih atas cinta, pengorbanan dan kebersamaan. Terimakasih Ayah DR. Tb. Donny Syafardan yang selalu menjadi panutan saya sejak kecil, seseorang yang secara ikhlas mengabdikan hidupnya untuk pendidikan serta anak istrinya. Walaupun tidak membantu substansi, skripsi ini tidak akan selesai tanpa uang kuliah dan uang saku yang biasa dilebihkan perbulannya. *You're my true hero.* Mami Etty Herawati yang tidak lepas tangan dari awal masuk hingga berakhirnya perkuliahan. Terimakasih telah memberikan makanan yang bergizi dan enak setiap harinya sehingga penulis rajin belajar. *Dear mami, I love you.*

6. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan mengerjakan skripsi, Nuke Putri dan Ronald Meizaqi. Terimakasih sebesar-besarnya untuk *my partner in crime* Nuke Putri yang selalu menemani penulis untuk mengerjakan skripsi walaupun lebih banyak hasutan untuk jalan-jalan dari pada mengerjakannya. Terimakasih juga untuk teman tersayang Ronald sudah memberikan arahan terkait skripsi dan mengajarkan cara membuat daftar isi, memeriksa typo dan memberikan informasi terupdate terkait skripsi. *Without you guys, my college life would be empty.*
7. Untuk kakak-kakak, my sister squad, Ria Warganda, Chessa Shintya, dan Aldila Chereta. Penulis menyadari bahwasanya hidup penuh liku-liku namun tidak akan terasa apabila memiliki kakak-kakak yang selalu mendukung serta mendoakan penulis. *My sisters are the chocolate chips of my life, love my beautiful sisters.*
8. Maxi Elfa Minahasa, motivator pribadi yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih selalu mendampingi serta meluangkan waktu disaat peneliti mengerjakan skripsi, memberikan semangat dikala peneliti malas dan lelah. Kalau tidak keberatan, penulis meminta untuk didampingi hidupnya. Boleh?

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7 Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II CITA-CITA INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA.....	28
2.1 Indonesia dan Konsep Poros Maritim Dunia.....	28
2.1.1 Pengertian Poros Maritim Dunia.....	29
2.1.2 Tujuan Poros Maritim Dunia.....	29
2.1.3 Misi Kebijakan Kelautan Indonesia.....	33
2.2 Faktor Pendorong Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.....	37
2.2.1 Faktor Internal.....	39
2.2.2 Faktor Eksternal.....	44
BAB III DENMARK SEBAGAI MITRA MARITIM INDONESIA.....	47
3.1 Politik Luar Negeri Denmark sebagai Global Maritime Hub.....	48
3.1.1 Faktor Internal.....	51
3.1.2 Faktor Eksternal.....	54
3.2 Prioritas Maritim Denmark.....	59
3.2.1 Penanganan Pembajakan Laut.....	59
3.2.2 Keamanan di Sekitar Arktik.....	61
3.2.3 Pelayaran Berkelanjutan.....	62
3.2.4 Pengurangan Beban Administrasi.....	64
BAB IV KONTRIBUSI KERJASAMA MARITIM DENMARK INDONESIA DALAM POROS MARITIM DUNIA.....	66
4.1 Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia-Denmark.....	66
4.1.1 Masa Orde Lama (1945-1965).....	66
4.1.2 Masa Orde Baru (1966-1990).....	68
4.1.3 Masa Reformasi (1998-2018).....	69
4.2 Persamaan Konsep Politik Luar Negeri Indonesia-Denmark.....	71

4.2.1 Prinsip Dasar.....	72
4.2.2 Diplomasi sebagai Prioritas Pembangunan Maritim.....	73
4.3 Diplomasi Maritim Indonesia - Denmark.....	75
4.3.1 Diplomasi Kooperatif Antara Indonesia dan Denmark.....	78
4.3.2 Implementasi Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia dan Denmark.....	78
4.3.3 Implementasi Kerjasama Indonesia-Denmark dengan Misi Kebijakan Kelautan Indonesia.....	90
4.3.4 Implementasi Goodwill Visit dengan Misi Kebijakan Kelautan Indonesia.	96
BAB V KESIMPULAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Geografis Indonesia.....	43
Gambar 3.1 Posisi Geografis Denmark.....	49
Gambar 3.2. Peta Geografi Denmark.....	53
Gambar 3.3 Perubahan Suhu Arktik.	57
Gambar 3.4 Statistik dari Armada Terbesar Sedunia.	63
Gambar 4.1. Diplomasi Maritim Jenis Kooperatif.....	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Richard Synder dalam Siklus Politik Luar Negeri.....	17
Bagan 1.2 Diplomasi Kooperatif menurut Christian Le Miere	21

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Implementasi Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Denmark.....	87
Tabel 4.2. Kontribusi Kerjasama Indonesia-Denmark dengan Misi Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Poros Maritim Indonesia.....	96

DAFTAR SINGKATAN

ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
AU	: <i>Aarhus University</i>
DANIDA	: <i>Danish International Development Agency</i>
DIS	: <i>Denmark International Shipping</i>
DTF	: <i>Multi-Donor Trust Fund</i>
EIA	: <i>Energy Information Administration</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GMF	: <i>Global Maritime Fulcrum</i>
HADR	: <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
IORA	: <i>Indian Ocean Rim Association</i>
MUDP	: <i>Miljøteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OMC	: <i>Marine Debris and Coastal Resources</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan. Untuk memaksimalkan potensi dari kondisi negara yang dikelilingi oleh hamparan laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibawah komando Presiden Joko Widodo menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat yang berbasiskan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan pandangan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.¹

Politik Luar Negeri Indonesia dituangkan dalam Visi Nawacita oleh Presiden Joko Widodo yang berisikan sembilan agenda prioritas sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim berdaulat dan mandiri.² Visi Nawacita pada butir pertama memaklumkan persoalan Politik Luar Negeri, sebagai mana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kutipan pidatonya di forum G-20 di Hangzhou, Tiongkok pada tanggal 4-5 September 2016,

“Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui

¹ Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015- 2019, hlm 1.

² Syarifudin Tippe, “Peta Potensi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia” *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, 12.

pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.”

Penekanan kata ‘negara maritim’ dalam pemaparan di atas memperjelas kepentingan nasional Indonesia untuk mewujudkan jati diri sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Presiden Joko Widodo mengedepankan strategi politik luar negeri yang bebas aktif dan penguatan kerja sama dengan negara lain.³

Poros Maritim Dunia yang dimaksud merupakan sebuah pemikiran untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan di laut seperti menjamin konektivitas antar pulau, peningkatan teknologi pada industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta penguatan pada keamanan maritim.⁴ Konsep tersebut muncul lantaran kondisi geografis yang dikelilingi oleh hamparan laut luas disertai dengan pulau-pulau di dalamnya membuat Indonesia kaya akan potensi lautnya. Kendati seperti itu, boleh dibilang Indonesia masih belum maksimal dalam pemanfaatan kekayaan maritimnya. Sebagai negara maritim yang memiliki sekitar 17.500 pulau, di mana 6.000 pulau di antaranya berpenduduk, Indonesia masih

³ “Visi Nawacita dalam Politik Luar Negeri Indonesia,” Presiden RI, 2016, diakses pada 6 September 2017 pukul 21.00, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/visi-nawacita-dalam-politik-luar-negeri-indonesia.html>

⁴ “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” Presiden RI, 2015, diakses pada 22 Agustus 2017 pukul 07.00, <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>

menitikberatkan pembangunan yang bersifat *in-land* ketimbang pembangunan maritim yang sebenarnya lebih butuh perhatian lebih dalam pemanfaatannya.⁵

Gagasan untuk menjadi Poros Maritim disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada dunia internasional melalui pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 lalu di Nay Pyi Taw, Myanmar. Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia.

Adapun kelima pilar itu yakni pertama adalah restrukturisasi budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen Indonesia dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan orientasi membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pokok utama. Ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, Diplomasi Maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Terakhir, pilar kelima ialah kewajiban Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera dalam membangun pertahanan maritim.⁶

Tulisan ini akan menitikberatkan pada analisa pilar keempat yakni Diplomasi Maritim dimana konsep tersebut dianggap penting lantaran Indonesia masih harus banyak belajar dari negara maritim yang lebih kuat dari Indonesia

⁵ “OECD Economic Surveys INDONESIA,” OECD, 2015, diakses pada 21 Agustus 2017 pukul 20.00, <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015.pdf>

⁶ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014, diakses pada 22 Agustus 08.00, <http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>

sendiri. Diplomasi Maritim merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan. Diplomasi Maritim dipercaya dapat menjadi instrumen untuk mempengaruhi perilaku dari negara lain dalam konteks interaksi dan transaksi yang terjadi di wilayah perairan.⁷ Untuk pembangunan maritim, konteks transaksi yang dimaksud bisa disebut dengan transfer teknologi, transfer pengetahuan, atau pun jual-beli alat maritim dari negara maritim maju ke negara maritim berkembang berdasarkan kepentingan nasional masing-masing pihak.

Kepentingan nasional suatu negara sendiri dapat dimengerti sebagai salah satu alasan paling kuat untuk sebuah negara melakukan interaksi dengan negara lain. Setiap negara memiliki satu kepentingan nasional yang sama yaitu untuk bertahan dalam tatanan struktur internasional yang telah ada. Kekuatan dapat dimiliki oleh suatu negara didapatkan dari hubungan kerjasama antar negara. Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan Politik Luar Negeri dalam bidang hubungan internasional. Melalui kerja sama internasional, negara-negara dapat memanfaatkan untuk pembangunan nasional.⁸ Interaksi dengan negara lain dalam konteks penguatan maritim ini dapat dilakukan melalui cara berdiplomasi dengan sesama negara maritim.

Salah satu negara yang dikenal sebagai negara industri maritim yang maju adalah Denmark. Denmark memiliki kapabilitas maritim yang memadai ditopang

⁷ Adriana Elisabeth, "Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif," National Seminar On Maritime Diplomacy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015 (Jakarta, Indonesia), diakses pada 22 Agustus 2017 pada pukul 15.00, <http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447>

⁸ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 5th ed. (United Kingdom: Oxford University Press), 86-87.

dengan aktivitas pelayaran secara global dengan disertai teknologi canggih. Kemampuan Denmark dalam menerapkan kebijakan yang menghasilkan keuntungan jangka panjang dan kondisi bisnis yang positif bagi industri maritim tidak perlu diragukan. Maka dari itu, negara nautikal skandinavia tersebut dipilih sebagai objek penelitian dalam tulisan ini.

Selain karena status Denmark yang merupakan salah satu dari negara dengan maritim yang kuat, alasan lain dibalik mengapa Denmark dipilih sebagai variabel dependen dalam tulisan ini karena secara geografis, Denmark dan Indonesia memiliki persamaan sebagai negara yang dikelilingi oleh perairan yang merupakan persimpangan lalu lintas dunia. Secara geografis Denmark adalah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, terdiri dari Semenanjung Jutland dan beberapa pulau di Laut Baltik sehingga dapat disebut sebagai Kepulauan Denmark. Keadaan geografis Denmark yang berada ditengah-tengah negara Eropa dan area Balkan membuatnya menjadi lokasi strategis untuk melakukan aktivitas maritim.⁹ Sama pula seperti keadaan Indonesia, di mana kepulauan Indonesia di tengah-tengah Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang sehingga memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia.¹⁰

Denmark juga memiliki visi sebagai pemimpin maritim dunia sebagai mana Indonesia memiliki mimpi sebagai Poros Maritim Dunia. Politik Luar Negeri Denmark dibawah Perdana Menteri, Lars Løkke Rasmussen, bertujuan untuk

⁹ “Denmark Maritime claims,” CIA World Fact Book, 2017, diakses pada 24 Agustus 2017 pukul 22.00, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2106.html>

¹⁰ “Indonesia Maritime claims,” CIA World Fact Book, 2017, diakses pada 24 Agustus 2017 pukul 22.20, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2106.html>

menjadikan Denmark sebagai Pemimpin Maritim Global atau *Global Maritime Hub*. Konsep dari *Global Maritime Hub* dilahirkan atas rekomendasi dari Tim Strategi Maritim dengan alasan bahwa semenjak dulu Denmark mengungguli sektor maritim diantara negara-negara lainnya dan merupakan salah satu yang terbesar dalam industri ekspor.

Dengan mengadakan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Denmark, terlihat adanya penggunaan Diplomasi Maritim sebagai instrumen penting dalam mencapai kepentingan Indonesia untuk mengembangkan sektor maritimnya. Dengan demikian, kegiatan Diplomasi Maritim antara Indonesia dan Denmark diharapkan membuahkan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan terlebih lagi guna mencapai kepentingan nasional Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam mewujudkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam pengembangan bidang maritimnya. Keterbatasan seperti masalah penataan batas maritim dan kelautan, konflik dalam pemanfaatan ruang di laut, persoalan keamanan dan keselamatan di laut, kurangnya pengelolaan sumber daya maritim, serta sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya maritim dan kelautan. Oleh karena itu pengadaan kerjasama maritim yang dilakukan Indonesia melalui diplomasi maritim dengan negara lain yang maju dalam bidang kemaritiman dapat menjadi jalan keluar bagi Indonesia menuju visi Indonesia sebagai pemimpin maritim global.

Namun hal ini tidak menjamin kesuksesan Indonesia dalam mencapai agenda Poros Maritim Dunia yang merupakan konsep terobosan baru dengan orientasi hasil yang tinggi. Penguatan aliansi dalam bidang maritim dengan negara lain dengan sektor maritim yang lebih canggih dari Indonesia sudah dilakukan namun belum menemukan hasil yang signifikan. Diharapkan kerjasama maritim dengan Denmark selaku negara kepulauan yang terkenal dengan kecanggihannya dapat mendongkrak Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti keterbatasan Indonesia sebagai mencapai visinya sebagai Poros Maritim Dunia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Denmark sebagai negara maritim dengan visi serupa yang bersesuaian dengan kepentingan nasional Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggariskan beberapa batasan seputar hubungan bilateral Indonesia dan Denmark dalam membantu Indonesia mencapai tujuannya sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama, periode waktu penelitian. Konsep Poros Maritim Dunia pertama kali dicetuskan pada era kepresidenan Joko Widodo. Oleh karena itu periode waktu penelitian dibataskan hanya dalam lingkup waktu terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2014 dengan pelantikan sebagai presiden yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2014. Namun, penelitian dibatasi pada waktu terakhir kali kerjasama ketika Denmark dan Indonesia menjalin kerjasama antara Aarhus University dan beberapa universitas di Indonesia pada Januari 2018.

Kedua, pembatasan pilar perwujudan cita-cita Presiden Joko Widodo. Terdapat lima pilar utama bagi Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai Poros Maritim Dunia. Namun hanya pilar keempat saja yang dikaji karena menyangkut dengan Diplomasi Maritim yang menjadi pokok dalam tulisan ini. Pilar keempat secara menyeluruh memuat tujuan Indonesia dalam memperbanyak mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan melalui Diplomasi Maritim.

1.2.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Apa kontribusi Diplomasi Maritim antara Denmark dan Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagai Poros Maritim Dunia?”**. Rangkaian kata dalam kalimat interogatif tersebut mampu mewakili semua sasaran masalah yang penulis alamatkan dengan memuat beberapa kata kunci seperti Diplomasi Maritim, Indonesia, Denmark, dan Poros Maritim Dunia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pertama yaitu untuk mengetahui kepentingan Diplomasi Maritim dalam mencapai Politik Luar Negeri Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Penulis akan menunjukkan bahwa Diplomasi Maritim dapat menjadi mekanisme penting dalam mencapai tujuan Politik Luar Negeri Indonesia. Kedua yaitu untuk mengetahui kerjasama apa saja yang dijalankan Indonesia dan Denmark yang termasuk dalam kontribusi pengembangan bidang maritim.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai hubungan Indonesia dan Denmark dalam pengembangan bidang maritim di bawah kepresidenan Joko Widodo bagi pembaca penelitian terutama para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian terkait isu Diplomasi Maritim. Lainnya adalah memberikan referensi berupa pertimbangan bagi pemerintah untuk menambah mitra kerja atau memperkuat hubungan bilateral dengan negara yang memiliki teknologi maritim yang lebih canggih untuk kemajuan maritim Indonesia serta menjadi titik konsiderasi untuk kelanjutan kerjasama bilateral dengan Denmark di bidang maritim.

1.4 Kajian Literatur

Kajian literatur pertama yaitu terkait pentingnya kerjasama dengan negara lain bagi kelancaran kebijakan Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo dijelaskan melalui buku yang diterbitkan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis* karya Poltak Partogi Nainggolan. Tulisan ini mengkaji memperlihatkan respons negara lain yang bermacam-macam dalam ide Poros Maritim Dunia di bawah kepresidenan Joko Widodo. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama melalui kehadiran dan partisipasi negara lain dengan hal penanaman modal asing dalam pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kerjasama di bidang hukum.

Artikel jurnal membahas bagaimana beberapa kerjasama telah dilakukan guna memperkuat agenda Poros Maritim Dunia. Sebagai contoh, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai lalu-lintas manusia di kawasan, pemberantasan terorisme, dan peran *Coast Guards* di Indonesia. Atase Pertahanan Amerika Serikat dan dua orang profesor peneliti masalah kelautan membantu *Coast Guard* Indonesia untuk membantu mencari jalan keluar terkait masalah-masalah keamanan maritim dan kerjasama multilateral di kawasan. Jepang juga turut mengambil andil dalam kerjasama *Coast Guard* sehingga kerjasama yang terbentuk berupa multilateral antara Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat untuk pembangunan *Coast Guards Academy*, sebagai bagian dalam perekrutan dan pengembangan lebih lanjut para kadet Akademi Angkatan Laut.¹¹

Kendati Indonesia membuka peluang untuk kerjasama yang tinggi dalam kerjasama maritim, Indonesia harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan banyak negara, tanpa harus terikat ke satu negara manapun agar tidak dapat dikontrol oleh kepentingan negara manapun, apalagi negara besar, dalam menjalankan dan meraih manfaat dari agenda Poros Maritim Dunia-nya. Bagi Pemerintah Joko Widodo, usulan kerjasama maritim masih dapat diperluas, termasuk dengan mengembangkan yang sudah lebih dulu ada, ataupun baru sama sekali, seperti IORA dan *Indo-Pacific Maritime*.¹²

Cina sebagai negara yang diangkat sebagai studi kasus dalam jurnal tersebut dijadikan contoh bagaimana Indonesia menolak kerjasama internasional yang

¹¹ Poltak Partogi Nainggolan, "Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis". *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Politica* Vol. 6, No. 2, Agustus 2015. Hlm. 178.

¹² Ibid hlm. 176

dianggap tidak kompeten untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Cina telah mengajukan agar proposal Jalur Sutra Maritimnya agar disatukan dalam proyek kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Tetapi, seperti dikatakan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Indonesia sendiri berpandangan kedua gagasan itu tidak bisa disatukan begitu saja, sehingga masih perlu dipelajari lebih jauh. Pandangan Indonesia ini didasarkan pada penilaian bahwa letak Indonesia yang strategis di persimpangan jalur pelayaran dunia telah membuatnya bisa mengambil keputusan secara lebih baik, untuk bisa mengambil manfaat yang optimal.¹³

Literatur kedua yaitu artikel jurnal berjudul *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia* yang ditulis oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman dalam Jurnal Wacana Politik. Pada literatur ini, dikatakan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun sektor maritim jika dilihat dari kondisi geografisnya yang strategis. Dengan melihat fakta geokultur tersebut, Indonesia seharusnya dapat menjadikan diplomasi maritim sebagai manuver utama bagi pembangunan sektor maritim. Literatur ini menitikberatkan arti penting penataan sektor maritim Indonesia yang dibahas melalui visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) yang menganggap potensi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang cukup kuat sebagai taktik diplomasi maritim dalam mewujudkan pembangunan maritim Indonesia.¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia" *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016. Hal. 175 – 182.

Literatur ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi maritim sebagai prioritas Indonesia untuk menjamin keamanan maritim dalam kancah regional dan global. Menurut Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, hal yang harus Indonesia perlu lakukan pertama adalah penataan sektor maritim seperti pembaharuan pelabuhan atau alokasi dana yang efektif untuk penguatan angkatan laut. Lalu langkah kedua adalah dengan promosi terhadap pelabuhan perdagangan yang sudah dimiliki baik di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta pelabuhan lainnya sebagai penanda bahwa Indonesia memiliki prospek maritim global. Apabila kedua langkah tersebut telah dilakukan, maka langkah ketiga adalah dengan meningkatkan pengamanan dan keamanan sehingga berbagai kerja sama akan terus berlangsung dan bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia pasca dilantikannya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia mengundang banyak akademisi untuk mengkajinya lantaran mengeluarkan Kebijakan Luar Negeri yang berfokus pada bidang yang tidak begitu menjadi perhatian pada kepresidenan sebelumnya yaitu bidang maritim. Pada literatur ketiga, Kebijakan Luar Negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo dijelaskan melalui jurnal berjudul *Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019* karya Ludiro Madu dengan menyatakan bahwa pendekatan diplomasi merupakan poin penting pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia era Presiden Joko Widodo.

Ludiro dalam tulisannya mengungkapkan bahwa agenda pertama untuk menjalankan visi tersebut yaitu dengan mencari aliansi maritim baru. identifikasi negara-negara yang paling berpotensi diajak bekerjasama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya ini memerlukan kerja

keras *out of the box* dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia selama ini. Tiongkok, AS, Singapura, Thailand, Perancis, Belanda, dan Rusia adalah beberapa negara dengan sumber daya maritim yang perlu mendapat perhatian. Langkah ini tentu aja dikaitkan dengan peningkatan intensitas kerjasama bilateral di negara-negara. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional juga digolongkan sebagai langkah awal untuk menjalin diplomasi dengan negara-negara lain, terutama pembangunan kerjasama untuk kemajuan bidang maritim mengingat bahwa kerja sama maritim adalah salah satu prioritas kebijakan luar negeri Jokowi.¹⁵

Terdapat beberapa hal yang membedakan tulisan ini dari ketiga literatur yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pertama, literatur dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan judul *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya* menitikberatkan kerja sama maritim dengan negara kekuatan global. Namun, tulisan ini menggiring pembaca untuk melihat perspektif baru bahwa kerja sama maritim tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan global. Penulis membuktikan bahwa negara non-adidaya seperti Denmark dapat menjadi negara yang unggul dalam bidang maritim dan dapat membantu negara berkembang seperti Indonesia dalam memperkuat bidang maritimnya.

Kedua, berbeda dengan jurnal oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman yang menitikberatkan konsep keamanan maritim dengan menjadikan TNI AL sebagai unit analisisnya, penulis akan membahas lebih dari

¹⁵ Ludiro Madu, "Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019" *Jurnal Transnasional*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014. Hlm. 105.

hanya unit tersebut. Penulis tentu tidak meniadakan pula kerjasama maritim yang bersangkutan dengan TNI AL karena sektor militer sangat bersangkutan dengan maritim. Namun, tulisan ini akan memaparkan unit-unit pada sektor maritim lainnya yang mencakup sistem pelayaran, pembangunan pelabuhan, perakitan kapal, teknologi dan servis kelautan, penangkapan ikan, dan *homeland security*.

Terakhir, perbedaan tulisan ini dengan literatur ketiga yang mana merupakan jurnal berjudul *Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019* karya Ludiro Madu yaitu bisa dilihat dari pemilihan negara yang dianggap berpotensi dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia. Ludiro Madu menyebutkan beberapa negara seperti Tiongkok, AS, Singapura, Thailand, Perancis, Belanda, dan Rusia, serta mengelaborasi kontribusi masing-masing negara dalam memobilisasi kepentingan nasional Indonesia sebagai Poros Maritim. Namun Ludiro Madu tidak mengangkat Denmark sebagai entitas dalam tulisannya sehingga tulisan ini dapat diadaptasi sebagai kaca mata dalam mengkaji politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lainnya, dalam kasus ini adalah Denmark dalam penguatan sektor maritim Indonesia era Presiden Joko Widodo.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan seperangkat teori dan konsep yang dapat menahan atau mendukung kasus penelitian. Uraian dari kerangka pemikiran diformulasikan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena yang terjadi dalam penelitian. Bahkan dalam banyak kasus, kerangka pemikiran digunakan untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi kritis. Kerangka pemikiran mengenalkan dan menjelaskan teori yang

menjelaskan mengapa masalah penelitian yang diteliti ada.¹⁶ Penelitian ini menggunakan tiga konsep dan satu teori yaitu Teori Neo Realisme, Konsep Politik Luar Negeri, Konsep Diplomasi Bilateral, dan Konsep Diplomasi Maritim. Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai acuan tingkatan dalam proses pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam memperkuat sektor maritimnya dengan menggunakan bantuan dari Denmark sebagai pihak kedua.

Neo Realisme merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam analisa kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional. Teori yang lahir dari kekecewaan terhadap pemikiran Realisme yang mengabaikan pengaruh globalisasi. Kenneth Waltz merupakan aktor dibalik berkembangnya pemikiran Neo Realisme. Walaupun masih meyakini bahwa sistem yang tercipta pada dunia internasional merupakan buah dari konsep anarki, namun yang membedakan adalah terdapat konsep kerjasama antar negara di dalamnya.¹⁷

Kerjasama dilandasi oleh suatu kepentingan nasional tiap negara dengan istilah lain yaitu *bandwagoning*. Dapat diartikan *bandwagoning* adalah keadaan ketika suatu negara memiliki kapabilitas yang minim atau tidak memadai dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain yang lebih kuat.¹⁸

Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Kepentingan nasional merupakan kata kunci dari teori ini dan negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas

¹⁶ Abend, Gabriel. "The Meaning of Theory." *Sociological Theory* 26, Juni 2008, hlm.173

¹⁷ Kenneth Waltz, "Theory of International Politics", *Waveland Press Inc*, 2010, hlm. 125

¹⁸ Ibid

yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan nasional agar mendapat hasil maksimal. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara menggunakan maneuver-manuver melalui politik luar negeri yang dijalankan.¹⁹

Konsep selanjutnya adalah Politik Luar Negeri dijelaskan dalam bukunya *Understanding International Relations* oleh Chris Brown bahwa politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk memperjelas dan meraih kepentingan nasional dalam dunia internasional. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan oleh Brown adalah bagaimana politik luar negeri dapat memobilisasi segala kekuasaan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam ranah internasional, setiap negara melakukan Politik Luar Negeri dengan cara mengeluarkan kumpulan kebijakan untuk mengatur hubungan dengan negara lainnya.²⁰

Politik Luar Negeri suatu negara menentukan interaksi negara dalam menetapkan hubungannya dengan negara lain. Oleh karena itu Politik Luar Negeri suatu negara merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Faktor-faktor eksternal mempengaruhi substansi kebijakan luar negeri yang meliputi kondisi perekonomian dunia, struktur sistem internasional, kebijakan dan tindakan negara lain, hukum internasional, masalah global dan regional yang muncul dari kegiatan individual, serta opini global. Sementara itu, faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kebijakan

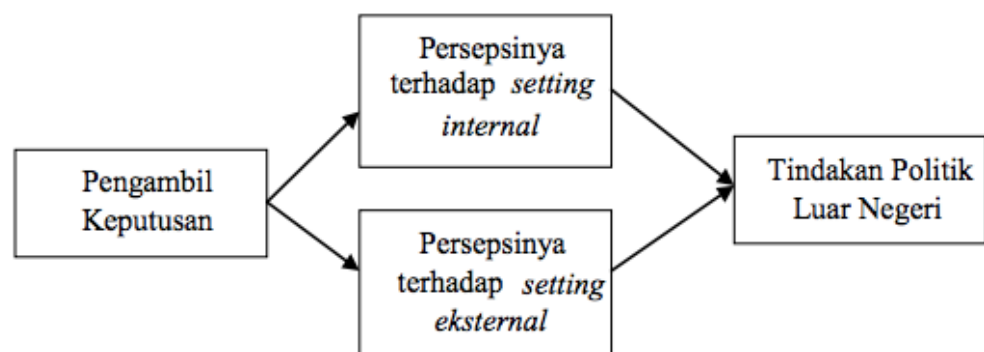
¹⁹ Ibid

²⁰ Chris Brown, "Understanding Internasional Relations", Palgrave, 2nd edition, London, 2001, hlm.68-86

luar negeri suatu negara yaitu kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, struktur pemerintahan, letak geografis, opini publik, pertimbangan etis, serta birokrasi.²¹

Tokoh lainnya yang memperjelas arti dari politik luar negeri adalah Richard Snyder. Snyder menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara dirancang oleh suatu individu atau kelompok yang berperan sebagai pembuat keputusan (*decision-maker*) dengan dua aspek tanggung jawab, eksternal dan internal. Aspek Eksternal dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor umum seperti isu lingkungan, teknik, atau krisis kemanusiaan. Sedangkan Aspek Internal dikategorikan sebagai politik domestik suatu negara dengan keterlibatan aktor nonpemerintah dan interaksi antar negara seperti budaya, masyarakat, ataupun perdagangan dan lain lain.²²

Bagan 1.1. Richard Synder dalam Siklus Politik Luar Negeri.



Pembuat keputusan dapat diasumsikan sebagai pemimpin negara sehingga persepsi pemimpin negara dalam memandang kepentingan nasional negaranya

²¹ K.J. Holsti, "International Politics: A Framework for Analysis", Prentice-Hall, US, 1967.

²² Richard C. Snyder, "Foreign Policy Decision – Making: An Approach to the Study of International Politics", The Free Press of Glencoe, 1962, hlm 65.

sangat penting dari pemimpin negara. Bisa dilihat dari prinsip Snyder, kebijakan luar negeri suatu negara akan diambil oleh pemimpinnya dengan pengaruh dari aspek-aspek eksternal dan internalnya.²³ Konsep-konsep tersebut akan banyak digunakan untuk menjelaskan pada bagian pemilihan kebijakan luar negeri baik yang Indonesia mau pun Denmark.

Konsep kedua yaitu Konsep Diplomasi Bilateral. Dalam menjalankan Politik Luar Negeri suatu negara, terdapat bermacam instrumen untuk memobilisasi pembuatan keputusan yang nantinya diadopsi sebagai kebijakan luar negeri, salah satunya dengan cara diplomasi. Diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Menurut Sir Ernest Satow, pengertian diplomasi secara klasik dikenal sebagai sebuah seni dari praktek negosiasi yang dilakukan oleh wakil negara. Pertemuan yang dilakukan antar wakil-wakil negara satu dengan wakil negara lainnya bertujuan untuk merundingkan suatu permasalahan agar dapat mencapai hasil yang bisa diterima oleh semua pihak. Pengertian yang lebih modern disampaikan oleh R.P Barston dengan menyatakan bahwa diplomasi merupakan manajemen dari hubungan antar negara dengan negara lain, serta dengan aktor lainnya yang non-negara.²⁴

Hubungan bilateral antar negara tentu tidak bisa dilepaskan dengan praktik diplomasi yang menjadi langkah awal dari negosiasi suatu perjanjian yang akan datang dengan harapan memenuhi kebutuhan kedua negara. Berdasarkan aktornya,

²³ ibid

²⁴ Ronald Peter Barston, "Modern diplomacy", *Pearson Education*, 2006, halaman 1.

diplomasi ada yang bersifat bilateral (hanya terdiri dari dua negara) dan multilateral (terdiri dari banyak negara). Untuk mengkaji hubungan Indonesia dan Denmark dalam ranah diplomasi, maka dalam penelitian diplomasi bilateral yang akan menjadi acuannya. Diplomasi dengan pola bilateral merupakan diplomasi yang hanya melibatkan dua negara dalam interaksinya sehingga memiliki sifat yang cenderung lebih eksklusif dan krusial.²⁵

Diplomasi bilateral masih dianggap sebagai pola diplomasi yang memiliki fleksibilitas untuk memudahkan dalam pencapaian kompromi.²⁶ Terlebih lagi diplomasi bilateral memberikan rasa atas kontrol dan pengelolaan dengan artian negara dapat menargetkan atau mengembangkan hubungan dengan negara atau aktor lainnya secara komprehensif melalui bidang-bidang tertentu seperti politik, ekonomi, medis, dan teknis atau strategis.²⁷ Sebagai contoh diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Denmark dengan membangun kerjasama maritim, dimana dengan diplomasi bilateral tersebut diharapkan dapat memajukan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan pola diplomasi bilateral ini, menurut penulis salah satu alasannya yakni memperkuat persahabatan antar kedua negara, mengingat bahwa secara geografi Indonesia dan Denmark tergolong mirip dan berlokasi strategis.

Konsep selanjutnya yang akan banyak digunakan dalam pemaparan tulisan ini adalah konsep Diplomasi Maritim. Diplomasi Maritim dapat disebut sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui ranah kelautan dengan harapan

²⁵ Evans dan Newnham, "The Penguin dictionary of international relations" *Penguin Reference*, 1998.

²⁶ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi antara Teori dan Praktik," *Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2012.

²⁷ Ronald Peter Barston, "Modern diplomacy", *Pearson Education*, 2006, halaman 41.

menghasilkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Mekanisme utama dari Diplomasi Maritim memang dengan melalui penggunaan angkatan laut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan instrumen lain bisa dilakukan juga mengingat bahwa isu internasional jaman kini sangat beragam. Diplomasi Maritim juga dapat bertindak sebagai pengaman untuk mengurangi potensi konflik, menghalangi musuh, melepaskan ancaman atau menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan konflik.²⁸

Diplomasi Maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan suatu negara yang berdaulat. Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan, Diplomasi Maritim yang modern dan inovatif adalah yang mengakomodasi cakupan isu yang lebih luas dan aktor yang lebih beragam untuk membangun strategi yang kreatif dalam menghadapi kompleksitas hubungan antarnegara.²⁹ Diplomasi Maritim juga dapat diartikan sebagai bentuk penggunaan kekuatan angkatan laut seperti kunjungan pelabuhan oleh kapal perang (*ports visit*), pelatihan kegiatan navigasi, dan kegiatan di sekitar pesisir pantai.³⁰

Pergolakan politik internasional abad 21 ini menuju pengaruh berbasis laut. Akibatnya, Diplomasi Maritim telah berubah menjadi alat unik dan berguna untuk angkatan laut dan mekanisme negara di seluruh dunia. Diplomasi Maritim memiliki spektrum kegiatan yang beragam seperti menavigasi ranah tindakan kooperatif,

²⁸ Ibid, hal. 5.

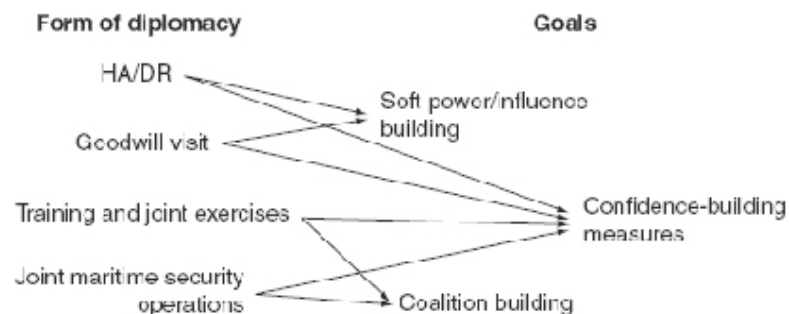
²⁹ Adriana Elisabeth, "Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif." *National Seminar On Maritime Diplomacy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. 2015. Jakarta, Indonesia. <http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447>

³⁰ Christian Le Mière, "Maritime Diplomacy in the 21 st Century: Drivers and Challenges." *Routledge*, New York, 2014. Hal. 3.

pelatihan maritim, bantuan kemanusiaan, penyebaran persuasi, ataupun penggunaan paksaan. Maka dari itu, Diplomasi Maritim dikelompokkan menjadi tiga model yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif. Karena hal yang akan dikaji merupakan hubungan diplomatik Indonesia dan Denmark yang lebih mengarah ke konsep kerjasama, maka dalam tulisan ini peneliti akan menggunakan sub-konsep Diplomasi Maritim Kooperatif.³¹

Diplomasi Maritim Kooperatif relevan dengan penggunaan kapal angkatan laut untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (HADR). Pendekatan filantropi semacam itu mencerminkan usaha untuk mendukung diplomasi maritim yang bersifat lembut. Diplomasi maritim kooperatif memiliki tiga dampak yaitu mendorong penggunaan bentuk kekuatan terbatas jika diperlukan, memungkinkan negara-negara untuk bekerja dalam koalisi multilateral, tidak menjamin interoperabilitas organisasi militer.³²

Bagan 1.2 Diplomasi Kooperatif menurut Christian Le Miere



³¹ Ibid, hal 6.

³² Ibid, hal 13.

Diplomasi Maritim merupakan sebuah sinyal negara terhadap sekutu dan musuh dari kebijakan luar negerinya dan kemampuan pasukan keamanannya. Diplomasi Maritim dianggap gagal jika akan mengarah pada jalur perang dengan penggunaan aksi koersif. Dari sudut pandang itu, Diplomasi Maritim adalah salah satu indikator terbaik perubahan keseimbangan kekuatan global atau regional dan alat analisis hubungan internasional.³³

Teori Neo Realisme digunakan dalam mengkaji kepentingan nasional Indonesia dalam menjadikan negara tersebut sebagai Poros Maritim Dunia dengan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat yang berbasiskan kepentingan nasional. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kepentingan nasional dan kerjasama merupakan elemen penting dalam Teori Neo Realisme, maka dari itu keputusan Presiden Joko Widodo dengan basis strategi politik luar negeri yang bebas aktif dan penguatan kerja sama dengan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Konsep Politik Luar Negeri dalam penelitian ini dipakai untuk mengkaji Politik Luar Negeri Indonesia yaitu Nawacita yang menitikberatkan pada bidang kemaritiman. Politik luar negeri suatu negara dirancang oleh suatu individu sebagai pembuat keputusan (*decision-maker*) dalam hal ini ialah Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memperhatikan dengan dua aspek tanggung jawab, eksternal dan internal dalam mengambil Politik Luar Negeri Indonesia. Aspek eksternal

³³ Ibid, hal 14.

dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor umum seperti isu kemaritiman dan potensi-potensi maritim yang harus digali lebih jauh. Sedangkan aspek internal merupakan politik domestik yang meliputi usaha dalam negeri dalam memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hasilnya berupa sebuah kebijakan luar negeri, dimana dalam kasus ini Presiden Joko Widodo menjadikan Diplomasi Maritim sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai agenda Poros Maritim Dunia-nya.

Konsep Diplomasi Bilateral tentunya dipakai untuk menganalisa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Denmark. Selanjutnya konsep Diplomasi Maritim secara spesifik digunakan untuk mengkaji hubungan kerjasama maritim antara Indonesia dan Denmark. Jenis Diplomasi Maritim yang digunakan oleh Indonesia merupakan Diplomasi Kooperatif karena mampu mencerminkan usaha untuk mendukung diplomasi maritim yang bersifat lembut atau tanpa adanya kekerasan. Diplomasi maritim kooperatif memiliki dampak yaitu mendorong penggunaan bentuk kekuatan terbatas jika diperlukan dimana dampak yang diharapkan bagi Indonesia dan Denmark adalah menjadi aliansi dalam bidang kemaritiman dan tidak menjamin interoperabilitas organisasi militer dimana Indonesia diharapkan mampu mengembangkan kapabilitas militernya sendiri melalui binaan militer Denmark.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Tulisan ini dirancang dengan prosedur yang terorganisir melalui metode penelitian. Metode penelitian kualitatif dianggap paling cocok dalam mengkaji topik yang diangkat oleh penulis yaitu dengan membantu mengembangkan gagasan dan hipotesis terkait analisa kerjasama antar dua negara. Metode kualitatif dapat

mengungkap kecenderungan pemikiran dan pendapat serta menyelam lebih dalam ke dalam masalah yang bersifat sosial.³⁴

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Metode bersifat studi pustaka dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik seperti buku, tulisan, artikel, serta media cetak dan elektronik yang akan menjadi sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan riset ini. Penulis menggunakan internet untuk mendapatkan artikel-artikel atau jurnal yang berhubungan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Denmark dalam bidang militer.

Penelusuran melalui internet dilakukan untuk mendapatkan informasi agar dapat mengisi kekurangan-kekurangan dari sumber buku yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini beberapa sumber data diperoleh melalui dokumen pemerintah Indonesia dan Denmark terkait pengembangan bidang maritim. Dokumen yang dimaksud adalah yang memuat kerjasama antara kedua negara tersebut, contohnya seperti Nota Kesepahaman. Penggunaan dokumen juga berperan untuk membantu membenarkan ejaan, judul atau nama yang benar dalam hubungan kerjasama kedua negara tersebut.

Untuk memperkuat data yang diperoleh dari studi pustaka di atas, perlu kiranya dilakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki otoritas intelektual terkait dengan kasus yang akan dibahas. Pihak otoritas yang dimaksud

³⁴Corrine Glesne, "Becoming Qualitative Researchers." Fourth edition, *Pearson*, Boston, 2011.

adalah Kedutaan Denmark di Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Penulis mewawancarai DR. Ir. Djoko Hartoyo MM. Marine Science selaku Kepala Biro Umum tahun 2018. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Informasi dan Hukum pada tahun 2014 dan beberapa kali kedatangan mengurus kerjasama maritim dengan Denmark.

Dari Kedutaan Denmark di Indonesia, penulis mewawancarai Ardi Hermawan selaku *Business Advisor*. Beliau secara spesifik berada di bidang perdagangan serta maritim. Dalam sektor maritim, beliau sudah beberapa kali menangani kerjasama maritim antara Denmark dan Indonesia secara langsung sehingga sumber dinyatakan memiliki otoritas intelektual yang memadai untuk memberikan data kepada penulis.

Jenis wawancara yang penulis ambil adalah jenis wawancara pedoman standar terbuka dimana pertanyaan akan dikembangkan secara spontan selama terjadinya percakapan antara periset dan responden namun tetap berawal dari pedoman pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Penulis berusaha untuk menunjukkan sikap yang fleksibel, objektif dan tidak cenderung mengadili, empirik, dan persuasif kepada subjek yang diteliti.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan bagian yang digunakan untuk memikirkan dan mengatur isi sebuah karya tulis. Penyusunan struktur akan membantu penulis agar tetap teratur dan fokus dengan apa yang akan diteliti. Ketika tulisan menyimpang dari struktur yang sudah ditetapkan pada bagian sistematika pembahasan dapat berarti bahwa karya tulis telah kehilangan fokus awal penelitian.

Maka dari itu, tanpa bagian sistematika pembahasan penelitian ini akan menjadi tidak fokus dan gagal digolongkan sebagai tulisan yang baik.³⁵

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas politik luar negeri yang diambil Indonesia dengan menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Politik luar negeri dengan kebijakan yang terbilang baru ini menjadi bagian krusial yang perlu dikaji secara mendalam agar keseluruhan tulisan ini dapat dijelaskan secara komprehensif.

Bab ketiga merupakan pembahasan terkait pemilihan Denmark sebagai negara yang ditunjuk oleh Indonesia untuk mengembangkan beberapa aspek maritimnya. Denmark sendiri merupakan variabel dependen dalam tulisan ini oleh karena itu butuh pembahasan mendalam untuknya.

Bab keempat merupakan analisa dari pemaparan bab dua dan bab tiga. Bab ini menjelaskan korelasi antara implementasi dari Diplomasi Maritim yang dilakukan oleh Denmark kepada Indonesia dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam tulisan atau bisa disebut dengan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Bab ini akan menjelaskan bagaimana sektor

³⁵ "How to Make an Outline" University of Washington, Psychology Writing Center, 1997. https://depts.washington.edu/psych/files/writing_center/outline.pdf

maritim di Indonesia dapat terekskalasi dengan mengadakan kerjasama maritim dengan Denmark.